



LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSIN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan Implementasi dari Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah selesai disusun.

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor: 060/047/SE/2023 tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan kinerja ini merupakan hasil capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan Renstra tahun 2025-2029.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Maret 2026

Pt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan



M. IGHWANSYAH, SP., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP. 19701016 200112 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2025 beberapa indikator kinerja dapat mencapai target bahkan melebihi target dan ada beberapa yang tidak mencapai target. Capaian yang diperoleh dari masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan, dengan target sebesar 0,40%, realisasi sebesar 0,76%, capaian yang diperoleh dari indikator ini adalah sebesar 190%.
2. Meningkatnya luas areal perkebunan, dengan target seluas 2.965.000 Ha, realisasi tahun 2025 adalah seluas 2.881.872 Ha, capaian yang indikator ini adalah 97,20%.
3. Produktivitas Karet, dengan target sebesar 1,48 Ton/Ha/Tahun, realisasi sebesar 1,18 Ton/Ha/Tahun, capaian indikator ini adalah sebesar 79,73%.
4. Produktivitas Kelapa Sawit, target yang ditetapkan sebesar 3,55 Ton/Ha/Tahun, realisasi sebesar 3,41 Ton/Ha/Tahun, capaian sebesar 96,06%.
5. Produktivitas Kopi, dengan target sebesar 0,95 Ton/Ha/Tahun, realisasi 0,95 Ton/Ha/Tahun, capaian pada indikator ini sebesar 100%.
6. Produktivitas Kelapa, ditetapkan target sebesar 1,19 Ton/Ha/Tahun, realisasi sebesar 1,16 Ton/Ha/Tahun, dengan capaian indikator sebesar 97,48%.
7. Jumlah benih unggul yang beredar, dengan target sebesar 17.250.000 benih/bibit, capaian realisasi sebanyak 73.966.775 benih/bibit atau sebesar >100%.

8. Persentase peningkatan prasarana perkebunan, ditetapkan target sebesar 13,75%, realisasi sebesar 13,75%, dengan capaian indikator sebesar 100%.
9. Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan, dengan target sebanyak 316 unit, realisasi sebanyak 313 unit, capaian indikator sebanyak 100%.
10. Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama, dengan target 24,150%, realisasi sebesar 9,69%, dengan capaian indikator kinerja 40,12%.
11. Meningkatnya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan, dengan target sebanyak 93 kelompok, realisasi sebanyak 93 kelompok, capaian indikator sebanyak 100 %.
12. Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target sebesar 115,15%, terealisasi sebesar 138% dengan capaian 119,84%.
13. Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dengan target sebesar 750 ha, realisasi seluas 70.864 ha, dengan capaian indikator sebesar lebih dari 100%.
14. Dukungan kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan, dengan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dengan capaian indikator sebesar 100%.

TIM PENYUSUN LKjIP DINAS PERKEBUNAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3
D. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	4
E. Landasan Hukum	7
F. Sistematika	9
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	19
B. Realisasi Anggaran	49
IV. PENUTUP	60
Lampiran	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2024-2026.....	13
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2024-2026)	14
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	15
Tabel 4. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.....	16
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan	20
Tabel 8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Luas Areal Perkebunan	21
Tabel 9. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Karet	22
Tabel 10. Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Karet	23
Tabel 11. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kelapa Sawit	25
Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kopi	25
Tabel 13. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kelapa	25
Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Benih Unggul yang Beredar	26
Tabel 15. Data Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2025	27
Tabel 16. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Prasarana Perkebunan	28
Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan.....	29
Tabel 18. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Petani yang Tergabung dalam Pengolahan dan Pemasaran Bokar.....	30

Tabel 19.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	31
Tabel 20.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani Perkebunan	32
Tabel 21	Target dan Capaian Indikator Kinerja Luas Areal yang Tertanggulangi dari Serangan OPT dan Gangguan Usaha	33
Tabel 22.	Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	33
Tabel 23	Target dan Capaian Indikator Kinerja Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan	34
Tabel 24	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025	35
Tabel 25	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Baseline) dan Tahun 2025	36
Tabel 26	Komponen Penilaian SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	38
Tabel 27	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	39
Tabel 28	Analisis Keberhasilan, kegagalan dan Solusi (Target pada Rancangan Perubahan Renstra 2024-2026)	41
Tabel 29	Analisis Keberhasilan, kegagalan dan Solusi (Target pada Renstra 2025-2029).....	42
Tabel 30	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 .	43
Tabel 31	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	46
Tabel 32.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	46
Tabel 33.	Realisasi Anggaran APBD Tahun 2025	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan	3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mempertanggungjawabkan pencapaian target kinerja tahunan. LKjIP merupakan output utama dari pelaksanaan SAKIP yang menghubungkan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara terintegrasi. Dokumen ini wajib disusun setiap akhir tahun anggaran oleh instansi pemerintah daerah atau pusat guna mengevaluasi realisasi program terhadap rencana kerja.

Penyusunan LKJIP Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi SAKIP untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja kepada Presiden/Wakil Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota, DPR/DPRD, dan masyarakat. Kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Penyampaian, Penilaian, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Regulasi ini menekankan kewajiban instansi untuk menyajikan data capaian kinerja, anggaran, dan faktor penghambat secara transparan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. LKJIP bertujuan memberikan informasi terukur tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renja SKPD. Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah daerah dan pusat menyusun LKJIP paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, dengan fokus pada pengukuran 5 elemen kinerja: efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, outcome, serta dampak program terhadap sasaran strategis.

Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan tahun berikutnya, mendukung sinergi antar program, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Laporan Ini menjelaskan komitmen instansi dalam berorientasi hasil, termasuk kendala yang dihadapi untuk pengambilan keputusan lebih tepat sasaran dan merupakan bagian krusial yang memberikan konteks penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai wujud akuntabilitas kinerja tahunan sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bagian ini biasanya disusun untuk menjelaskan dasar hukum, visi organisasi, capaian sebelumnya, serta tantangan strategis yang menjadi landasan evaluasi realisasi Renja terhadap RPJMD/RKPD

LKJIP ini mengevaluasi realisasi 14 indikator kinerja utama dari Renja 2025 yang selaras dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan 6 indikator kinerja utama yang selaras dengan Renstra Tahun 2025-2029.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai standar mutu benih yang ada, dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu tanaman pengadaaan dan perbanyak serta penyebaran agensia hayati dan pestisida nabati.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang Perkebunan dan Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan
3. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan
4. Pembinaan produksi di bidang perkebunan
5. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
6. Pembinaan UPTD
7. Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan
8. Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan
9. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan

10. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan
11. Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
12. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan
13. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan
14. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
15. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

D. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam pengembangan usaha perkebunan aspek strategis, meliputi:

1. *Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu petugas maupun petani.*

Rendahnya kualitas SDM akibat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan manajerial, minimnya pendidikan, dan lemahnya kelembagaan petani menyebabkan produktivitas tanaman menjadi rendah. Peningkatan kompetensi SDM pekebun menjadi kunci utama untuk optimalisasi pemeliharaan tanaman, integrasi dari hulu ke hilir dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi serta terhadap perubahan iklim. Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan teknis, penyuluhan serta beasiswa berupa kolaborasi multi pihak seperti antara pemerintah dengan asosiasi untuk membangun SDM yang berdaya saing.

2. *Lahan perkebunan.*

Permasalahan utama pada lahan perkebunan adalah terjadinya konversi lahan antar komoditas sehingga berisiko terhadap ekologis, konflik agraria dan degradasi akibat tanaman tua. Ketersediaan dan kesesuaian lahan menjadi faktor prioritas dalam pengembangan komoditas. Strategi yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi lahan, peremajaan tanaman tua dan menciptakan sentra-sentra

kawasan perkebunan untuk mendukung hilirisasi dan ketahanan energi serta integrasi infrastruktur dan partisipasi dari petani akan memperkuat daya saing.

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Perkebunan bekerja sama dengan mitra yang berada di kecamatan dalam hal perlindungan kepada masyarakat pekebun, deteksi dan pencegahan dini timbulnya konflik di lahan perkebunan, sosialisasi dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan.

3. *Sarana dan Prasarana Perkebunan.*

Keterbatasan infrastruktur mengakibatkan tingginya biaya transportasi dan resiko kerusakan hasil panen menjadi tinggi. Keterbatasan akses petani terhadap alat dan mesin pertanian serta sebaran alat dan mesin pertanian yang tidak merata juga menjadi permasalahan utama.

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi modal utama dalam penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP). Penerapan GAP dan GHP yang merupakan pendekatan budidaya yang baik dan benar, pasca panen dan pengolahan yang menekankan memperkecil *losses*, meningkatkan keamanan pangan, berkelanjutan lingkungan dan efisiensi terhadap pengelolaan sumber daya seperti air, tanah, penggunaan pupuk dan pestisida.

4. *Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan.*

Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, dimana benih yang bermutu menjadi salah satu penentu produktivitas.

Benih ilegal dan tidak bersertifikat merupakan salah satu masalah terbesar dalam peningkatan produksi sub sektor perkebunan, meningkatkan resiko kontaminasi genetik yang berdampak pada kerugian ekonomi terhadap sub sektor perkebunan.

Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan benih bermutu, mencegah peredaran benih ilegal serta melindungi produsen benih dan konsumen pengguna benih.

Pengawasan dan pembinaan secara rutin juga dilakukan kepada para produsen benih/bibit tanaman perkebunan. Pengawasan ini meliputi pengawasan

peredaran benih/bibit dan pengawasan mutu benih/bibit. Meskipun demikian keterbatasan kapasitas dan frekuensi pengawasan serta koordinasi antar lembaga masih belum optimal, perlu diperkuat sistem pengawasan secara terpadu dan terintegrasi antara UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) Dinas Perkebunan bersama stake holder lainnya guna menjamin keberlanjutan perbenihan yang unggul.

5. Kelembagaan petani

Kelembagaan petani yang meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi petani dan forum petani memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian dan posisi tawar petani dalam rantai pasok produk perkebunan.

Permasalahan utama pada kelembagaan petani yaitu masih lemahnya manajemen, transparansi keuangan dan partisipasi aktif para anggotanya sehingga kondisi ini menghambat efektifitas dan efisiensi kelompok dalam melakukan pembinaan, pengadaan bibit berkualitas, pengelolaan hasil produksi dan pemasaran sehingga harga yang diperoleh petani fluktuatif. Selain itu kesadaran petani untuk tergabung dalam kelembagaan masih rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan serta pemerataan bantuan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada petani terutama yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan anggota kelompok tani dan mendorong petani untuk membentuk kelembagaan.

6. Izin usaha perkebunan

Izin usaha perkebunan merupakan instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan, kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta perlindungan terhadap lingkungan dan petani-petani disekitar perusahaan perkebunan. Perizinan usaha yang jelas dan terintegrasi akan membantu mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan, mencegah terjadinya

konflik sosial dan mencegah eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan. Untuk itu pengawasan rutin terus dilakukan seperti pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

7. Produksi perkebunan yang berkelanjutan

Aspek strategis produksi perkebunan berkelanjutan mencakup ekstensifikasi dan intensifikasi, serta integrasi kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan produksi sub sektor perkebunan. Permasalahan utama produksi adalah rendahnya produktivitas dimana terdapat perbedaan antara hasil panen aktual yang dicapai petani dengan potensi hasil yang seharusnya dapat dicapai oleh petani pada lahan dan iklim yang sama atau yang sering disebut *yield gap*.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini diantaranya dengan penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang tepat dosis, tepat waktu, dan sudah melalui analisis tanah, dan menerapkan *Good Agricultural Practices (GAP)*.

8. Pemasaran produk hasil perkebunan

Pemasaran produk perkebunan masih terkendala pada panjangnya rantai pemasaran, fluktuasi harga, minimnya akses pasar dan pengembangan jaringan pemasaran.

Rantai pemasaran yang panjang dapat diatasi dengan tergabung dalam kelembagaan petani, kemitraan dengan unit usaha, dan pasar lelang. Untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengatasi fluktuasi harga dapat diatasi dengan melakukan diversifikasi tanaman, stabilisasi pasokan dan penguatan posisi tawar petani melalui kebijakan pemerintah dan kemitraan. Promosi dan pengenalan produk secara berkala dan berkelanjutan dilakukan melalui *event* pameran sehingga dapat meningkatkan akses pasar dan memperluas jaringan pemasaran produk petani.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.
14. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (Perubahan DPA-SKPD) Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2025.

E. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- E. Landasan Hukum
- F. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2025
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sejalan dengan paradigma pembangunan masyarakat melalui pembangunan perkebunan maka didalam rencana strategis Dinas Perkebunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Visi Sumsel 2025-2029 "**Sumsel Maju Terus untuk Semua**" dengan Misi 2 yaitu:

Misi 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasisi sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program-program yang dituangkan untuk mendukung pencapaian misi ini yang selaras dengan sub sektor perkebunan, yaitu:

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Medorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
3. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kesejahteraan petani sub sektor perkebunan, dengan indikator pencapaiannya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan.

Strategi Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan kedepan atau periode 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor perkebunan dengan memberikan akses yang adil dan setara terhadap teknologi, pelatihan dan pendidikan bidang perkebunan.
- b. Melakukan Optimalisasi Lahan-lahan perkebunan yang kurang produktif untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas.
- c. Pembangunan perkebunan diarahkan pada perluasan areal perkebunan sesuai dengan potensi pengembangan dalam RTRW dan topografi kewilayahan.
- d. Peningkatan penggunaan sarana perkebunan.

- e. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana di sub sektor perkebunan.
- f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan
- g. Meningkatkan penanganan panen di sektor perkebunan sesuai dengan anjuran dan standar penanganan.

Arah kebijakan sub sektor perkebunan lima tahun ke depan diambil dari strategi yang ditetapkan adalah :

- 1) Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang kurang produktif.
- 2) Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani perkebunan.
- 3) Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan.
- 4) Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam memanfaatkan pengembangan serta penumbuhan industri hilir.
- 5) Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat.
- 6) Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi.
- 7) Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perlindungan usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan.
- 8) Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan.
- 9) Terus melakukan peningkatan ketersediaan alat dan mesin perkebunan agar budidaya perkebunan lebih efektif dan efisien diwilayah pengembangan perkebunan.
- 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing.
- 11) Mendorong peningkatan sistem pengolahan hasil perkebunan dan sistem budidaya yang baik serta sesuai dengan anjuran.

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahun 2025 telah disusun dan tercantum dalam Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan tercantum juga pada Renstra Tahun 2025-2026 yang baru disusun. Rencana kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%)	0.39	0.40	0.41		
				Meningkatnya Jumlah luas areal perkebunan (Ha)	2.960.000	2.965.000	2.970.000		
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan		Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	1.47	1.48	1.50		
		Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)		3.54	3.55	3.56			
		Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)		0.94	0.95	0.96			
		Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)		1.18	1.19	1.20			
		Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)		17.000.000	17.250.000	17.500.000			
		Persentase Peningkatan prasarana perkebunan (%)		13.70	13.75	13.80			
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)		316	316	316			
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)		24.10	24.15	24.20			
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)		92	93	94			
	Meningkatnya perlindungan Perkebunan	Nilai Tukar Petani Perkebunan		115.10	115.15	115.20			
		Dukungan Kesejahteratan untuk meningkatkan produksi perkebunan		Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	650	750	850		
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	100	100			

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2024-2026)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%)	%	0,40
			Meningkatnya Jumlah luas areal perkebunan (Ha)	Ha	2.965.000
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	Ton/Ha/Tahun	1,48
			Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	Ton/Ha/Tahun	3,55
			Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	Ton/Ha/Tahun	0,95
			Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	Ton/Ha/Tahun	1,19
			Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	Benih	17.250.000
			Persentase Peningkatan prasarana perkebunan (%)	%	13,75
			Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)	Unit	316
			Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)	%	24,15
			Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	Kelompok	93
			Nilai Tukar Petani Perkebunan	%	115,15
		Meningkatnya perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	Ha	750
		Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

Tujuan	Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	-	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130,35	116
	Meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,46	0,109
			Ton	1.008.362,07	1.009.461,18
		Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,87	0,445
	Meningkatnya produksi kopi		Ton	3.399.995,63	3.415.125,61
		Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5,12	3,713
			Ton	218667,51	226.786,630
	Meningkatnya produksi kelapa	Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0,14	1,441
			Ton	61647,2	62.535,540
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	Nilai atau skor	80,72	80,75

Tabel 4. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.563.852.324
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan dan Dokumen	130.500.000
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	11.871.829.000
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	164.275.550
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	612.500.000
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	341.687.890
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1.408.059.884
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	1 Tahun	1.035.000.000
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas pengembangan komoditi perkebunan	150 Ha	3.141.299.560
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah dokumen pengawasan peredaran sarana pertanian	4 laporan	1.118.878.960
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah dokumen pengawasan mutu, penyediaan & peredaran benih tanaman	3 dokumen	1.891.375.000
C.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme	Periode pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi	1 Tahun	131.045.600
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	100%	228.125.000
A.	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	2 Laporan	228.125.000
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	850 Ha	534.985.000
A.	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (kegiatan)	2 kegiatan	534.985.000
V.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha yang diawasi dan dibina	20%	37.900.000
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah dokumen rekomtek usaha perkebunan	-	37.900.000
VI.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	80%	10.431.538.100
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah cakupan binaan kelompok tani	94 Kelompok	10.381.138.100
B.	Pengembangan Kapasita Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasisi Kawasan	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk	1 kelompok	50.400.000
	Total			29.937.699.984

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan diketahui oleh Gubernur Sumatera Selatan, di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai sasaran pembangunan perkebunan tahun 2025.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	➤ Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan (%) ➤ Meningkatnya luas areal perkebunan (Ha)	0,40% 2.965.000 Ha
2.	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Perkebunan	➤ Produktivitas Karet ➤ Produktivitas Kelapa Sawit ➤ Produktivitas Kopi ➤ Produktivitas Kelapa ➤ Jumlah benih unggul yang beredar (benih) ➤ Persentase peningkatan prasarana perkebunan (%) ➤ Meningkatkan pengawasan perusahaan perkebunan (unit) ➤ Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%) ➤ Meningkatkan kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan (kelompok) ➤ Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	1,48 Ton/Ha/Thn 3,55 Ton/Ha/Thn 0,95 Ton/Ha/Thn 1,19 Ton/Ha/Thn 17.250.000 benih 13,75% 316 unit 24,15% 93 kelompok 115,15%

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana yang diatur dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.289/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik berupa data internal maupun data eksternal. Data kinerja untuk indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan setiap tahun untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada tahun selanjutnya terkait dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran kinerja mencakup:

- (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan
- (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2025 sesuai dengan pernyataan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang telah ditanda tangani. Penilaian capaian target indikator kinerja tahun 2025 (berdasarkan Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026) akan ditampilkan di bawah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

1. Persentase Peningkatan Luas Tanaman menghasilkan

Indikator ini mengukur persentase peningkatan luasan tanaman menghasilkan pada total luasan perkebunan yang ada di Sumatera Selatan. Adapun rumus yang digunakan $\frac{\text{Luas tanaman menghasilkan tahun } n \text{ dikurangi tahun } n-1}{\text{Tahun } n-1} \times 100\%$. Sumber data berasal dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, yang pengukurannya dilakukan satu tahun sekali. Tujuannya adalah untuk mengukur dan mendorong peningkatan produksi tanaman perkebunan.

Pada indikator peningkatan luas tanaman menghasilkan ditetapkan target sebesar 0,40% dengan harapan di akhir tahun 2025 akan terjadi kenaikan luas tanaman menghasilkan sebesar 0,40%.

Data statistik perkebunan tahun 2025 (angka sementara) menunjukkan bahwa luas tanaman menghasil sebesar 2.151.433,86 Ha, di tahun 2024 luas tanaman menghasilkan sebesar 2.135.158 Ha. Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan sebesar 0,76%.

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan	0,40	0,76	190

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian peningkatan luas Tanaman Menghasilkan (TM) tercapai sebesar 190% (melebihi target), hal ini dikarenakan adanya konversi dari Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) ke status Tanaman Menghasilkan (TM), harga komoditi yang cukup stabil mendorong petani untuk memelihara kebun dengan lebih intensif sehingga mendukung pertumbuhan ke fase produktif. Peremajaan tanaman perkebunan juga mampu meningkatkan luas Tanaman Menghasilkan (TM) secara bertahap.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan sepanjang tahun 2025 meliputi bimbingan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dilaksanakan oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan bersama kelompok-kelompok tani, peremajaan tanaman kopi seluas 100 Ha dan

karet seluas 50 ha, serta penyuluhan kepada petani dengan dukungan dari Petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TP4) yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

2. Meningkatnya Luas Areal Perkebunan

Indikator ini mengukur pertambahan luas areal perkebunan di Sumatera Selatan, yaitu jumlah total luas areal tahun n-1. sumber data berasal dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan ditetapkan indikator ini adalah untuk mengukur keberhasilan program pengembangan atau perluasan tanaman perkebunan dalam kontribusinya terhadap peningkatan produksi dan tingkat kesejahteraan petani pekebun.

Pada indikator kinerja meningkatnya luas areal perkebunan, telah ditetapkan target sebesar 2.965.000 Ha. Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2025 (angka sementara), luas areal perkebunan untuk seluruh komoditi yang terdiri dari 19 komoditi (4 diantaranya adalah komoditi unggulan yaitu Karet, Kopi, Kelapa dan Kelapa Sawit) adalah seluas 2.881.871,81 Ha. Angka ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Luas Areal Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (ha)	Realisasi (ha)	%
1.	Meningkatnya luas areal perkebunan	2.965.000	2.881.871,81	97,20

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas areal perkebunan pada tahun 2025 lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan data luas areal yang disusun belum final karena proses validasi dengan kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Perkebunan belum dilakukan. Setelah ada validasi, diharapkan ada penambahan luas areal perkebunan, sehingga target kinerja tercapai.

Namun demikian, luas areal tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini didukung adanya kegiatan-kegiatan bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan APBD berupa bantuan bibit tanaman

kopi untuk 100 Ha dan bantuan bibit karet untuk luasan 50 Ha. Sedangkan dari APBN ada kegiatan bongkar ratoon tebu seluas 1.200 Ha

3. Produktivitas Karet

Indikator ini mengukur produksi tanaman karet (karet kering) per hektar dalam periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebun karet serta penerapan teknologi budidaya yang baik. Rumusan yang digunakan adalah Total Produksi Karet (Kg atau Ton) / Luas Areal Tanaman Menghasilkan karet (Ha). Sumber data dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tanaman Karet mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan, dimana Sumatera Selatan merupakan salah satu penghasil karet terbesar di Indonesia. Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2024, produksi Karet rakyat Sumatera Selatan sebesar 1.008.362,07 Ton dengan produktivitas sebesar 1.202,28 Kg/Ha/Tahun Sedangkan di tahun 2025 (angka sementara) sebesar 985.325,32 Ton atau 1.180,90 Kg/Ha/Tahun. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi maupun produktivitas Karet dibandingkan tahun 2024.

Target yang ditetapkan pada indikator produktivitas Karet tahun 2025 adalah sebesar 1,48 Ton/Ha/Tahun, jika dibandingkan dengan target, produktivitas yang dihasilkan tahun 2025 yaitu masih rendah yaitu sebesar 1,18 Ton/Ha/Tahun.

Tabel 9 . Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Karet

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (Ton/Ha/ Thn)	Realisasi (Ton/Ha/ Thn)	%
1.	Produktivitas Karet	1,48	1,18	79,73

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya tanaman yang didominasi tanaman tua dan adanya serangan penyakit gugur daun (*Pestalotiopsis sp.*) sehingga menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas tanaman karet. Alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit dan harga yang rendah memperburuk kondisi tersebut.

Tabel 10. Serangan hama dan penyakit pada tanaman karet

No	Jenis Tanaman	Luas Areal Tanaman (Ha)	Jenis Hama Penyakit	Luas Areal Seranggn (Ha)	Luas Areal Pengendalian (Ha)	Keterangan (Sumber Data)
I	Karet	1.238.415	Penyakit Pestalotiopsis	9.743	5.828	Kab/Kota
		1.238.415	Hama Babi Hutan	110	43	
		1.238.415	Penyakit Kering Alur Sadap	15.870	9.762	
		1.238.415	Penyakit Gugur Daun	26.028	18.416	
		1.238.415	Penyakit Jamur Akar Putih	28.555	18.658	

Sumber data: Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Usaha yang dapat dilakukan agar produksi tetap baik disaat luas lahan berkurang akibat alih fungsi lahan ke sawit dan serangan penyakit yang menyebabkan gugur daun adalah optimalisasi lahan diantaranya peremajaan tanaman tua dengan menggunakan bibit unggul yang tahan penyakit, melakukan pemupukan yang tepat, penguatan SDM serta kelompok tani, dan memberikan bimbingan dan penyuluhan GAP melalui kelompok tani.

4. Produktivitas Kelapa Sawit

Indikator ini mengukur produksi tanaman kelapa sawit (TBS atau CPO) per hektar dalam periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebun kelapa sawit serta penerapan teknologi budidaya yang baik. Rumusan yang digunakan adalah Total Produksi kelapa sawit (Kg atau Ton) / Luas Areal Tanaman Menghasilkan kelapa sawit (Ha). Sumber data dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi pendapatan daerah maupun kesempatan kerja. Industri Kelapa Sawit menciptakan lapangan kerja mulai dari tenaga kerja petani, pekerja pabrik pengolahan dan tenaga ahli yang terlibat dalam pengolahan perkebunan. Hal ini memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada indikator kinerja produktivitas Kelapa Sawit telah ditetapkan target sebesar 3,55 Ton/Ha/Tahun di tahun 2025.

Tabel 11. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kelapa Sawit

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (Ton/Ha/ Thn)	Realisasi (Ton/Ha/ Thn)	%
1.	Produktivitas Kelapa Sawit	3,55	3,41	96,06

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian di tahun 2025 baru mencapai 96,06% dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah data angka sementara tahun 2025 dan diharapkan produktivitas akan terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan luas lahan kelapa sawit baik itu lahan bukaan baru maupun lahan dari alih komoditi lainnya dan adanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah dilakukan terhadap kebun-kebun Kelapa Sawit tua.

Berdasarkan data yang ada, luasan kelapa sawit yang telah dilakukan peremajaan seluas 66.015,0756 Ha dari total luas Rekomtek BPBD seluas 75.016,0232 Ha sepanjang tahun 2017-2025, yang tersebar di 9 kabupten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

5. Produktivitas Kopi

Indikator ini mengukur produksi tanaman kopi (biji kering) per hektar dalam periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebun kopi serta penerapan teknologi budidaya yang baik. Rumusan yang digunakan adalah Total Produksi kopi (Kg atau Ton) / Luas Areal Tanaman Menghasilkan kopi (Ha). Sumber data dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tanaman Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan di Sumatera Selatan. Areal perkebunan Kopi menyebar di 13 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Di tahun 2024 produksi Kopi mencapai 219.585,55 Ton dengan produktivitas sebesar 937,90 Ton/Ha/Tahun. Di tahun 2025 (angka sementara), produksi sebesar 227.266,87 Ton dengan produktivitas sebesar 949,64 Ton/Ha/Tahun.

Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kopi

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (Ton/Ha/ Thn)	Realisasi (Ton/Ha/ Thn)	%
1.	Produktivitas Kopi	0,95	0,95	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditentukan telah tercapai. Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan permintaan pasar, peningkatan segmen pasar yang mengakibatkan peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) petani, dukungan iklim serta penggunaan tenaga kerja optimal.

6. Produktivitas Kelapa

Indikator ini mengukur produksi tanaman kelapa (kopra) per hektar dalam periode satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebun kelapa serta penerapan teknologi budidaya yang baik. Rumusan yang digunakan adalah Total Produksi kelapa (Kg atau Ton) / Luas Areal Tanaman Menghasilkan kelapa (Ha). Sumber data dari buku Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Kelapa merupakan salah satu komoditas ekspor dari Sumatera Selatan dalam bentuk kelapa bulat, santan, kopra, arang dan sebagainya. Kebutuhan akan kelapa cukup besar baik itu dari dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Ini bisa menjadi peluang untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Kelapa di tahun mendatang.

Pada indikator kinerja telah ditentukan besarnya produktivitas Kelapa di tahun 2025 yang akan dicapai yaitu sebesar 1,19 Ton/Ha/Tahun. Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2025 (angka sementara), produktivitas Kelapa sebesar 1,16 Ton/Ha/Tahun.

Tabel 13. Target dan Capaian Indikator Kinerja Produktivitas Kelapa

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (Ton/Ha/ Thn)	Realisasi (Ton/Ha/ Thn)	%
1.	Produktivitas Kelapa	1,19	1,16	97,48

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa target yang telah ditentukan belum tercapai. Faktor yang mempengaruhinya adalah tanaman kelapa tua dan rusak dengan produksi yang rendah serta adanya serangan hama dan penyakit.

Usaha untuk meningkatkan produksi kelapa mulai dilakukan dengan penambahan kebun sumber benih kelapa untuk mendukung rencana peremajaan kelapa pada tahun 2026 dengan strategi difokuskan pada peremajaan tanaman tua dan rusak melalui benih unggul bersertifikat. Tahun 2025 melalui kegiatan bersumber dari APBN telah dilakukan peremajaan kelapa seluas 100 Ha di Kabupaten banyuasin. Di tahun 2026 direncanakan akan dilakukan peremajaan kelapa melalui APBN Satker Pusat seluas 10.000 ha dengan rincian 1.000 Ha di Kabupaten Musi Rawas, 7.000 Ha di Kabupaten Banyuasin, dan 2.000 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di beberapa tahun kedepan.

7. Jumlah Benih Unggul yang Beredar

Indikator ini mengukur jumlah total benih/bibit unggul yang telah bersertifikat yang beredar di masyarakat atau pihak pengguna lainnya dalam periode satu tahun. Adapun perhitungannya adalah jumlah benih unggul yang tersertifikasi tahun ke-n. Sumber data diperoleh dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengukur keberhasilan kegiatan penyediaan dan distribusi benih unggul, mendorong peningkatan produksi dan produktivitas serta mendukung sistem agribisnis yang berdaya saing.

Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Benih Unggul yang Beredar

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (Benih)	Realisasi (Benih/bibit)	%
1.	Jumlah Benih Unggul yang Beredar	17.250.000	73.966.775	>100

Capaian jumlah benih tanaman perkebunan yang beredar dari target sebanyak 17.250.000 benih/bibit, terealisasi sebanyak 73.966.775 benih/bibit tahun 2025 dengan capaian sebesar >100%

Jumlah benih unggul yang beredar sebanyak 73.966.775 benih/bibit, adalah benih/bibit yang tersertifikat, yang tercatat pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Tabel 15. Data Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2025

Karet				Kelapa Sawit			Tebu (mata)	Pinang (batang)	Kelapa Dalam (batang/butir)	Total Benih
Polybag (batang)	Stum MT (batang)	Biji	Entres (batang/meter)	Polybag (batang)	Kecambah (butir)	Biji (butir)				
378.458	6.000	1.400.000	34.187	4.734.965	14.585.771	-	52.767.394	30.000	30.000	73.966.775

Keterangan:

- a. Data bersumber dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
- b. Stum MT = Stum Mata Tidur

Capaian yang cukup tinggi ini didorong oleh permintaan yang cukup tinggi akan bibit unggul bersertifikat baik itu permintaan dari masyarakat maupun dari perusahaan-perusahaan perkebunan serta adanya program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan pada sub sektor perkebunan melalui peningkatan produksi tebu, kopi, dan kelapa serta masih berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat. Untuk peningkatan produksi tebu, pemerintah melalui penggunaan APBN, melaksanakan kegiatan bongkar ratoon tebu seluas 1.200 Ha, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ilir. Untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit tebu berupa mata, telah dilakukan sertifikasi benih tebu sebanyak 52.767.394 mata tebu.

8. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Prasarana Perkebunan

Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana perkebunan sebagai indikator kinerja telah ditetapkan dengan target sebesar 13,75%, ini mengindikasikan pemanfaatan unit prasarana perkebunan berupa bangunan laboratorium di UPTD BPTP Dinas Perkebunan di tahun 2025.

Tabel 16. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Prasarana Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan	13,75	13,75	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sebesar 13,75% dapat dicapai. Hal ini didukung oleh pemanfaatan prasarana untuk memproduksi Agen Pengendali Hayati (APH) untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.

9. Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan.

Indikator ini mengukur peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan perkebunan dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perkebunan dalam periode tertentu. Pengawasan mencakup aspek perizinan, kemitraan, tata kelola perkebunan yang baik dan tanggungjawab sosial. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah unit usaha/perusahaan perkebunan yang dilakukan pengawasan. Sumber data diperoleh dari bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan perkebunan masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan perkebunan. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan perusahaan perkebunan lintas kabupaten/kota. Dinas perkebunan bertugas mengawasi dan membina perusahaan agar mengikuti kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip keberlanjutan, sedangkan perusahaan perkebunan berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan petani pekebun.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap unit usaha perkebunan, kegiatan-kegiatan yang bentuknya pengawasan secara rutin setiap tahunnya terus dilaksanakan seperti Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar, melakukan Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Besar, Pendataan perkebunan.

Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%
1.	Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan	316	313	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berjumlah 313 perusahaan, hal ini telah dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan tersebut.

10. Persentase Petani yang Tergabung dalam Pengolahan Pemasaran Bersama

Indikator ini mengukur persentase jumlah petani pekebun yang telah bergabung menjadi anggota UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar). kelembagaan ini berfungsi untuk memperkuat posisi tawar petani, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses pasar. Rumus yang digunakan pada indikator ini adalah $\frac{\text{jumlah UPPB dikurangi UPPB tahun } n-1}{\text{UPPB tahun } n-1} \times 100\%$, dan sumber data diperoleh dari bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat

penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran.

UPPB yang terbentuk merupakan UPPB untuk komoditas karet yang diharapkan dapat meningkatkan harga jual produk olahan dari petani. Dengan adanya UPPB ini petani bisa melakukan lelang bokar atau melakukan kemitraan dengan perusahaan, selain itu menumbuh kembangkan industri hilir karet didalam negeri baik itu untuk pembuatan ban, sarung tangan dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan penyerapan konsumsi karet dalam negeri diharapkan ikut meningkatkan harga karet kedepan.

Ekspor Komoditas karet yang masih dalam bentuk bahan mentah ikut mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan penentu harga karet masih di Singapore Comodity (SICOM) sehingga harga karet termasuk yang memiliki fluktuasi harga yang cukup besar. Untuk lebih dengan adanya UPPB ini petani bisa melakukan lelang bokar atau melakukan kemitraan dengan perusahaan.

Sistem pemasaran yang ada di UPPB tersebut adalah kemitraan dan lelang. Untuk pemasaran dengan sistem kemitraan terdapat pada UPPB yang berada di Kabupaten Musi Rawas (MURA), Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Kota Lubuk Linggau, sedangkan kabupaten/kota dengan sistem lelang dengan periode lelang mingguan, dua mingguan dan bulanan.

Tabel 18. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Petani yang Tergabung dalam Pengolahan Pemasaran Bokar

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Persentase Petani yang Tergabung dalam Pengolahan Pemasaran Bokar	24,15	9,69	40,12

Petani yang tergabung dalam UPPB sebesar 9,79% atau sebanyak 53.640 orang/petani pada tahun 2024 dari total petani karet sebanyak 548.032 orang, dan menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar 9,69% atau sebanyak 52.331 orang/petani dari total petani karet sebanyak 539.902 orang/petani.

Rendahnya persentase petani yang tergabung dalam lembaga UPPB dikarenakan respon petani yang negatif terhadap UPPB karena manajemen yang lemah, kurangnya edukasi dan kegagalan dalam pengembangan UPPB. Harga

karet yang tidak kompetitif mendorong alih fungsi ke sawit sehingga petani membubarkan diri dari kelembagaan tersebut.

11. Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan

Indikator ini mengukur jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menerima layanan penyuluhan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam periode satu tahun terhadap jumlah kelompok tani yang ada. Penyuluhan yang dimaksud bisa dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, transfer teknologi untuk meningkatkan kapasitas petani pekebun dalam mengelola usaha perkebunannya agar lebih menguntungkan.

Target pada indikator meningkatnya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan adalah sebanyak 93 kelompok, dengan realisasi pada tahun 2025 sebanyak 93 kelompok, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 100%. Meningkatnya kelompok tani yang mendapat penyuluhan didukung oleh Petugas TP4 (Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan) berjumlah 155 orang yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Banyaknya kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan juga didukung dengan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ,serta adanya kegiatan bantuan kepada masyarakat melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 19. Target dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (kelompok)	Realisasi (kelompok)	%
1.	Meningkatnya kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan	93	93	100

12. NILAI TUKAR PETANI PERKEBUNAN

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Data diperoleh dari BPS Sumatera Selatan berupa data bulanan.

Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga komoditas perkebunan yang dihasilkan petani. Indeks harga yang dibayar adalah indeks harga barang/jasa yang dibayar petani untuk: biaya produksi (pupuk, pestisida, benih, upah tenaga kerja), penambahan barang modal (alat/mesin pertanian), dan konsumsi rumah tangga.

NTP Perkebunan > 100 : Surplus (pendapatan lebih besar dari pengeluaran, daya beli menguat dan kesejahteraan meningkat.

NTP Perkebunan = 100 : Impas (*Break Even*), pendapatan = pengeluaran, kesejahteraan tidak berubah.

Nilai Tukar Petani tanaman perkebunan rakyat tahun 2025 sebesar 138%. Nilai Tukar Petani lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya. Target capaian indikator kinerja Nilai Tukar Petani Perkebunan sebesar 115,15% di akhir tahun 2025 tercapai.

Tabel 20. Target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Nilai Tukar Petani Perkebunan	115,15	138	119,84

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani sebesar 138%, itu artinya petani memiliki daya beli yang lebih besar terhadap barang-barang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup atau bahkan melakukan investasi untuk mengembangkan usaha pertaniannya.

13. Luas Areal yang Tertanggulangi dari Serangan OPT

Indikator ini mengukur luas lahan perkebunan yang telah dilakukan tindakan pengendalian terhadap serangan Organisme Penggaggu Tumbuhan (OPT) berupa hama, penyakit, dan gulma sehingga kerusakan tanaman dapat dicegah atau dikurangi dalam periode satu tahun. Pengendalian OPT dilakukan untuk melindungi tanaman dari kerusakan, gangguan metabolisme atau kematian yang dapat menurunkan produksi.

Pada indikator kinerja luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), telah ditetapkan target seluas 750 Ha dengan realisasi seluas 70.864 Ha (data diperoleh dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)).

Tabel 21. Target dan Capaian Indikator Kinerja Luas Areal yang Tertanggulangi dari Serangan OPT dan Gangguan Usaha

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (ha)	Realisasi (ha)	%
1.	Luas Areal yang Tertanggulangi dari Serangan OPT dan Gangguan Usaha	750	70.864 Ha	> 100

Pada tahun 2025 luas serangan hama dan penyakit yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan seluas 105.455 Ha dengan luas pengendalian seluas 70.864 Ha atau sebesar 67,20%. Pengendalian ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) dan swadaya masyarakat.

Tabel 22. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

No	Jenis Tanaman	Luas Areal Tanaman (Ha)	Jenis Hama Penyakit	Luas Areal Serangn (Ha)	Luas Areal Pengendalian (Ha)	Keterangan (Sumber Data)
1	Karet	1.238.415	Penyakit Pestalotiopsis	9.743	5.828	Kab/Kota
		1.238.415	Hama Babi Hutan	110	43	
		1.238.415	Penyakit Kering Alur Sadap	15.870	9.762	
		1.238.415	Penyakit Gugur Daun	26.028	18.416	
		1.238.415	Penyakit Jamur Akar Putih	28.555	18.658	
2	Kelapa Sawit	1.234.229	Hama Ulat Api	1.323	786	Kab/Kota
		1.234.229	Hama Tikus	2.173	2.542	
		1.234.229	Kumbang Tanduk/Drytes	503	460	
		1.234.229	Gano Derma/ Busuk Pangkal Batang	549	342	
3	Kopi	1.234.229	Karat Daun	31	18	Kab/Kota
		267.783	Hama Penggerek Buah	12.193	8.443	
		267.783	Penyakit Karat Daun	1.129	803	
		267.783	Penyakit Penggerek Cabang	5.480	3.734	
4	Kelapa	267.783	Penyakit Jamur Akar	412	218	Kab/Kota
		64.731	Hama Kumbang Dryctes	305	141	
		64.731	Hama Ulat Hidari Irava	389	162	
		64.731	Tupai	29	22	

No	Jenis Tanaman	Luas Areal Tanaman (Ha)	Jenis Hama Penyakit	Luas Areal Serang (Ha)	Luas Areal Pengendalian (Ha)	Keterangan (Sumber Data)
5	Lada	11.402	Penyakit Kuning	89	72	Kab/Kota
		11.402	Penyakit Busuk Pangkal Batang	178	134	
		11.402	Hama Penghisap Buah	366	280	

Sumber: Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

14. Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan

Tabel 23. Target dan Capaian Indikator Kinerja Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan	100	100	100

Capaian indikator dukungan kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan tercapai 100%, hal ini didorong oleh pengelolaan administrasi yang efisien, koordinasi yang baik berbagai pihak dalam organisasi, penyediaan data dan informasi yang akurat, perencanaan yang tepat, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta komitmen dan dukungan dari pimpinan organisasi.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Perentase peningkatan luas tanaman menghasilkan (%)	0.20	0.66	303	0.39	0.16	41	0.40	0.76	190
		Jumlah luas areal Perkebunan (Ha)	2.855.000	2.974.373	104,18	2.980.000	2.861.226	97	2.985.000	2.881.872	97,20
		Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	1.36	1.18	86,76	1.47	1.17	79,59	1.48	1.18	79,73
		Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	3.50	3.42	97,71	3.54	3.43	96,89	3.55	3.41	96,06
		Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	0.93	0.86	92,47	0.94	0.89	94,68	0.95	0.95	100
		Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	1.17	1.15	98,3	1.18	1.15	97,46	1.19	1.16	97,48
		Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	35.000.000	18.420.044	52,63	17.000.000	19.076.378	112,20	17.250.000	73.966.775	> 100
		Persentase peningkatan prasarana perkebunan (%)	na	na	na	13,70	20	145,98	13,75	13,75	100
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)	240	316	131,7	316	316	100	316	313	100
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemsaran bersama (%)	7,00	10,5	150	24,10	9,79	40,62	24,15	9,69	40,12
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	40	71	177,5	92	122	132,60	93	93	100
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	98	105.064	107,21	115,10	130,35	113,25	115,15	138	119,84
		Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	3.000	500	16,7	650	32.767	> 100	750	70.864	> 100
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/ Meningkatnya Perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	90	100	111,1	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Dukungan Kasekretariat untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	90	100	111,1	100	100	100	100	100	100

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Baseline) dan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024 (Baseline)	2025		
					Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130.35	116	138	118.96
2.	Sasaran 1: Meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0.460	0.109	-2.28	-2
			Ton	1.008.362.07	1.009.461.18	985.325.32	97.61
		Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0.870	0.445	0.59	132.58
			Ton	3.399.995.63	3.415.125.61	3.419.952.76	100.14
		Persentase peningkatan Kopi	%	5.810	3.713	3.93	105.84
			Ton	218.667.51	226.786.630	227.266.87	100.2
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0.14	1.441	0.16	11.0
			Ton	61.647.20	62.535.540	61.744.75	98.74
		Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	Scor	80.72	80.75	78.90	97.71

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan dengan capaian realisasi sebesar 118,96 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi kenaikan NTP perkebunan dari 130,35 menjadi 138.
- 2) Indikator persentase peningkatan produksi karet dengan capaian realisasi dibawah nilai positif dengan capaian realisasi produksi sebesar 97,61 persen. Ini menunjukkan bahwa produksi menurun dari tahun 2024, target persentase peningkatan produksi dan target produksi yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan produksi sebesar 0,460% , sedangkan pada tahun 2025 terjadi penurunan produksi dari 1.008.362,07 Ton pada tahun 2024 menjadi 985.325,32 Ton pada tahun 2025.
- 3) Indikator persentase peningkatan produksi kelapa sawit dengan capaian realisasi peningkatan produksi sebesar 132,58 persen dan capaian peningkatan produksi sebesar 100,14 persen. Walaupun target tercapat, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2024 (0,870%), persentase kenaikan produksi lebih rendah di tahun 2025 (0.59%).
- 4) Indikator persentase peningkatan produksi Kopi dengan capaian realisasi sebesar 105,84%, terjadi kenaikan produksi dari 218.667,51 ton pada tahun 2024, 227.266,87% di tahun 2025. tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang kenaikan produksinya sebesar 5,810% dibandingkan dengan tahun 2023, lebih kecil pada tahun 2025.
- 5) Indikator persentase peningkatan produksi kelapa dengan capaian realisasi sebesar 11,10% (tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 1,441%). meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2024 tetap terjadi kenaikan jumlah produksi yang sebelumnya sebesar 61.647,20 ton pada tahun 2024, pada tahun 2025 sebesar 61.744,75 ton.
- 6) Indikator persentase peningkatan produksi (karet, kopi, kelapa sawit dan kelapa) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$$

7) Indikator nilai SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, juga terjadi penurunan nilai SAKIP yang semula pada tahun 2024 sebesar 80,72, pada tahun 2025 turun menjadi 78,90. adapun komponen yang mengalami penurunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Komponen Penilaian SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	30	5,08	7,62	12,70	25,4
2.	Pengukuran Kinerja	30	5,68	8,52	14,20	28,39
3.	Pelaporan Kinerja	15	1,90	2,84	4,74	9,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,82	15,63
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,78	23,67	39,45	78,90

Sumber: Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 27. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	<u>Tujuan:</u> Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	-	-	-
2.	<u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan	Produksi Karet	985.325,32 Ton/Tahun	-	-
		Produktivitas Karet	1.180,90 Kg/Ha	1.500 Kg/Ha	78,73
		Produksi Kelapa Sawit	3.419.952,76 Ton/Tahun	-	
		Produktivitas Kelapa Sawit	3.413,22 Kg/Ha	6.600 Kg/Ha	51,72
		Produksi Kopi	227.266,87 Ton/Tahun	-	
		Produktivitas Kopi	947,92 1.164 Kg/Ha	975 Kg/Ha	97,22
		Produksi Kelapa	61.744,75 Ton/Tahun	-	
		Produktivitas Kelapa	1.164,52 Kg/Ha	2.600 Kg/Ha	44,79
3.	<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tanaman perkebunan di Sumatera Selatan masih berada di bawah standar, nasional yang tercantum dalam buku Pedoman Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tanaman-tanaman tua, serangan hama dan penyakit, pengelolaan yang belum optimal, pengaruh iklim, keterbatasan teknologi dan akses pasar.

Tanaman perkebunan yang sudah melewati usia produktif (tanaman tua) mampu menurunkan hasil panen hingga 30-50%, OPT tidak terkontrol mampu mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen, praktik budidaya tidak sesuai standar anjuran seperti pemupukan penanganan panen dan perawatan lahan mampu menurunkan produksi, perubahan pola curah hujan dan cuaca ekstrem mempengaruhi periode berbunga dan pembuahan pada tanaman, minimnya penggunaan alat dan mesin membuat proses budidaya tidak efektif dan efisien, serta kesulitan petani dalam menjual hasil dengan harga baik.

Solusi yang dapat dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan meliputi: peremajaan tanaman, pengendalian OPT secara masif baik secara kimiawi dan non kimiawi, pembinaan kelompok tani untuk melakukan pengelolaan budidaya sesuai anjuran, memberikan bantuan alat dan mesin untuk mendukung pengolahan hasil panen dan penguatan pasar.

Tabel 28. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Target pada Rancangan Perubahan Renstra 2024-2026)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.k	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan (%)	0.40	0.76	190	1. Konversi dari Tanaman belum Menghasilkan (TBM) ke Tanaman Menghasilkan (TM) 2. Harga beberapa komoditi yang cukup stabil 3. Pemeliharaan kebun yang intensif	Validasi data, melakukan perencanaan tanaman dan menerapkan GAP
		Jumlah luas areal Perkebunan (Ha)	2.965.000	2.881.872	97.20	1. Data yang digunakan adalah data angka sementara statistik perkebunan tahun 2025	Validasi data, melakukan ekstensifikasi, peremajaan tanaman
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	1.48	1.18	79.73	1. Data yang digunakan adalah data angka sementara statistik perkebunan tahun 2025 2. Dominasi tanaman karet tua 3. Serangan penyakit gugur daun	1. Validasi data 2. Peremajaan tanaman tua 3. Pemupukan yang tepat 4. Penguatan SDM Petani 5. Bimbingan GAP
		Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	3.55	3.41	96.06	1. Data angka sementara tahun 2025	
		Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	0.95	0.95	100	1. Harga yang baik 2. Peningkatan permintaan pasar	
		Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	1.19	1.16	97.48	1. Dominasi tanaman tua dan serangan hama dan penyakit	
		Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	17.250.000	73.966.775	> 100	1. Meningkatnya permintaan masyarakat akan benih/bibit unggul ditunjang dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2. Bantuan Pemerintah berupa benih unggul kepada masyarakat	Tetap melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman
		Persentase peningkatan prasarana perkebunan (%)	13.75	13.75	100	1. Kebijakan Pemerintah terkait regulasi yang mendorong pengembangan perkebunan. 2. Dukungan peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan perkebunan.	Melakukan pemutakhiran data kebutuhan prasarana dan mengarahkan untuk pemenuhan kebutuhan akan prasarana perkebunan
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)	316	313	100	1. Sudah menjadi kewenangan Dinas Perkebunan provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan. 2. Adanya koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota.	Terus meningkatkan pengawasan dan tetap berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)	24.15	9.69	40.12	1. Alih fungsi lahan ke komoditi lain 2. Meningkatnya UPPB non akrif 3. Turunnya produksi karet	Mengaktifkan kembali UPPB yg sudah berhenti, dan melakukan pendampingan secara rutin
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	93	93	100	1. Adanya Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TP4) yang tersebar di 17 kabupaten/kota sangat membantu dalam pembinaan kelompok tani. 2. Dukungan dari kegiatan program peremajaan Sawit Rakyat	Menyediakan anggaran untuk penyuluhan dan memperbanyak jumlah penyuluhan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	115,15	138	119,84	1. Naiknya harga beberapa komoditi perkebunan. 2. Peningkatan produksi komoditi perkebunan 3. Peningkatan harga domestik dan ekspor yang memperkuat posisi tawar petani.	Meningkatkan harga komoditas perkebunan, meningkatkan produksi dan produktivitas, mengurangi biaya produksi, serta penguatan kelembagaan dan pasar.
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/ Meningkatkan Perindugan Perkebunan	Luas areal yang tertanggunglapi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	750	65.868	> 100	Dukungan anggaran APBD Prov. SumseI dan kesadaran petani yang secara swadaya melakukan pengendalian OPT untuk meningkatkan produksi.	Terus melakukan pendampingan kepada petani dalam hal pengendalian secara hayati, pengendalian kultur teknis, pengendalian secara mekanik dan kimiawi
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perranglat Daerah (%)	100	100	100	1. Pengelolan administrasi yang efisien. 2. Koordinasi yang baik berbagai pihak dalam organisasi. 3. Penyediaan data dan informasi yang akurat. 4. Perencanaan yang tepat. 5. Dukungan SDM dan. 6. Komitmen dan dukungan pimpinan.	Meningkatkan anggaran untuk mendukung program pemenuhan layanan kinerja pada Disbun SumseI

Tabel 29. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Target pada Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	116	138	118,96	1. Harga jual produk diterima petani lebih besar dari biaya konsumsi	Meningkatnya harga dan terbukanya pasar produk perkebunan
2.	Sasaran 1: Meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi Karet	0.109	-2.28	2	1. Angka yang digunakan adalah angka sementara statistik perkebunan 2025 2. Alih fungsi lahan ke komoditi lain	Peremajaan tanaman tua
		Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	0.445	0.59	132.58	1. Dukungan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2. Harga yang stabil	Meneruskan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

		Persentase peningkatan Kopi	3.713	3.93	105.84	1. Program sambung pucuk kopi meningkatkan produksi 2. Harga kopi yang tinggi 3. Pemeliharaan yang baik	Stabilisasi harga, peremajaan tanaman tua, pembinaan kelompok tani
		Persentase peningkatan produksi Kelapa	1.441	0.16	11.10	.1. Banyaknya tanaman tua dan rusak	Peremajaan tanaman tua dan pengendalian OPT pada tanaman kelapa.
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	80.75	78.90	97.71	Nilai SAKIP turun pada komponen laporan kinerja	Akan terus ditingkatkan

Tabel 30. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		15.563.852.324		14.041.931.721		90,22
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		130.500.000		116.386.837		89,19
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.871.829.000		10.794.143.072		90,92
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		164.275.550		164.275.550		100
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		612.500.000		520.049.127		84,91
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		341.687.890		341.687.890		100
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.408.059.884		1.102.988.554		78,33
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.035.000.000		1.002.400.691		96,85
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		3.141.299.560		3.052.487.351		97,17
A.	Pengawasan Pedaran Sarana Pertanian		1.118.878.960		1.058.146.233		94,57
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		1.891.375.000		1.875.561.876		99,16
C.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi		131.045.600		118.779.242		90,64

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	228.125.000	220.011.429	96,44
A.	Penataan Prasarana Pertanian	228.125.000	220.011.429	96,44
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	534.985.000	497.191.349	92,94
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	534.985.000	497.191.349	92,94
V.	Program Perizinan Usaha Pertanian	37.900.000	36.747.350	96,96
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.900.000	36.747.350	96,96
VI.	Program Penyuluhan Pertanian	10.431.538.100	9.996.411.576	95,83
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	10.381.138.100	9.947.382.702	95,82
B.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	50.400.000	49.028.874	97,28

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, melalui kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa, pemeliharaan barang milik daerah, telah menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dengan realisasi 100%, keberhasilan ini dicapai melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan terintegritas, administrasi keuangan yang akuntabel, administrasi kepegawaian yang terintegrasi, dan pengelolaan aset yang terprogram dan terinventaris.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, melalui kegiatan pengawasan peredasan sarana pertanian; pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman; dan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme, telah menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja terutama pada target jumlah benih unggul yang beredar, dengan capaian sebesar >100%. keberhasilan ini dicapai didorong oleh permintaan yang cukup tinggi akan bibit unggul bersertifikat baik itu permintaan dari masyarakat maupun dari perusahaan-perusahaan perkebunan.

3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, melalui kegiatan penataan prasarana pertanian, telah berhasil mencapai target pada indikator kinerja persentase peningkatan prasarna perkebunan sebesar 100%, ini didukung kebijakan pemerintah terkait regulasi yang mendorong pengembangan perkebunan.
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, melalui kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan perkebunan dan pengendalian OPT. Capaian kinerja yang dicapai melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung pendanaan dari APBD dan kontribusi swadaya petani yang menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha tani. Dukungan dana APBD digunakan untuk kegiatan teknis seperti pelatihan pengendalian hama terpadu, penyediaan input yang ramah lingkungan dan pendampingan petani. Sedangkan petani berperan dalam kegiatan operasi dan penerapan praktik di lapangan.
5. Program perizinan usaha pertanian melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini berupa pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.
6. Program penyuluhan pertanian melalui kegiatan pengembangan penerapan penyuluh pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tersedianya penyuluh perkebunan yang ditempatkan di hampir seluruh kabupaten/kota diharapkan mampu membantu mempercepat peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui penyuluhan dan pembinaan yang dilakukannya.

Tabel 31. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	116	138	118,96	14.373.847.660	13.802.849.055	96,03	efisien
2.	Sasaran 1: Meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,109	-2,28					
			Ton	1.009.461,18	985.325,32	97,61				
		Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,445	0,59	132,58				
			Ton	3.415.125,61	3.419.952,76	100,14				
		Persentase peningkatan Kopi	%	3,713	3,93	105,84				
3.	Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Ton	226.786,630	227.266,87	100,2				
		Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	1,441	0,16	11,10				
			Ton	62.535,540	61.744,75	98,74				
		Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	Skor	80,75	78,90	97,71	15.563.852.324	14.041.931.721	90,22	Efisien

Tabel 32. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	15.563.852.324	14.041.931.721	90,22	Efisien

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 lap./ dokumen	6 lap./ dokumen	100	130.500.000	116.386.837	89,19	Efisien
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	11.871.829.000	10.794.143.072	90,92	Efisien
C.	Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun					
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	612.500.000	520.049.127	84,91	Efisien
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	341.687.890	341.687.890	100	Efisien
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	1.408.059.884	1.102.988.554	78,33	Efisien
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	1.035.000.000	1.002.400.691	96,85	Efisien
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	150 Ha	150 Ha	100	3.141.299.560	3.052.487.351	97,17	Efisien
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0,39	0,39	100	1.118.878.960	1.058.146.23	94,57	Efisien
B	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dok.	3 Dok.	100	1.891.375.000	1.875.561.876	99,16	Efisien
C	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1 Tahun	1 Tahun	100	131.045.600	118.779.242	90,64	Efisien
III	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	100	100	100	228.125.000	220.011.429	96,44	Efisien
A	Penataan Prasarana Pertanian	2 Lap.	2 Lap.	100	228.125.000	220.011.429	96,44	Efisien
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	850 Ha	850 Ha	100	534.985.000	497.191.349	92,94	Efisien
A	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	2 Keg	2 Keg.	100	534.985.000	497.191.349	92,94	Efisien
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	20%	20%	100	37.900.000	36.747.350	96,96	Efisien
A	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan	1 Keg.	1 Keg	100	37.900.000	36.747.350	96,96	Efisien

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
VI.	usahnya dalam daerah kabupaten/kota	80	80	100	10.431.538.100	9.996.411.576	95,83	Efisien
A.	Program Penyuluhan Pertanian							
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	94	94	100	10.381.138.100	9.947.382.702	95,82	Efisien
B	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	1 Kel.	1 Kel	100	50.400.000	49.028.874	97,28	Efisien

B. Realisasi Anggaran

Tabel 33. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2025

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
Total		29.937.699.984	27.844.780.776	99,73
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%	15.563.852.324	14.041.931.721	99,99
A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (6 laporan dan dokumen)	130.500.000	116.386.837	100
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya 5 Dokumen: RKA Induk, DPA Induk, RKA Perubahan, DPPA Perubahan dan Data Statistik	115.000.000	104.778.747	100
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya 1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.500.000	11.608.090	100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah (1 Tahun)	11.871.829.000	10.794.143.072	90,92
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun (792 orang/bulan)	11.544.829.000	10.580.013.072	91,64
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 5 dokumen	327.000.000	214.130.000	65,48
C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya perlengkapan kebutuhan kantor	164.275.550	164.275.550	100
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 1 paket	134.989.550	134.989.550	100,00

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (2 orang)	29.286.000	29.286.000	100,00
D Administrasi Umum Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah (1 tahun)	612.500.000	520.049.127	84,91
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor dan 2 UPTD sebanyak 1 paket	32.500.000	28.777.480	88,55
2 Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 1 paket	245.000.000	210.203.388	85,80
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket	25.000.000	16.627.000	66,51
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 dokumen	20.000.000	4.584.000	22,92

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi		Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5	
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 150 laporan	290.000.000	259.857.259	89,61	100
E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	341.687.890	341.687.890	100	100
1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebanyak 1 unit kendaraan roda 4	241.900.000	241.900.000	100	100
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan sebanyak 35 unit	99.787.890	99.787.890	100	100
F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.408.059.884	1.102.988.554	78,33	100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	8.500.000	100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan	600.000.000	484.309.554	100
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya 24 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	788.059.884	610.179.000	100
G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.035.000.000	1.002.400.691	100
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	90 unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	800.000.000	767.680.125	100
2 Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	20 unit peralatan dan mesin yang terpelihara	45.000.000	44.896.600	100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	190.000.000	189.823.966	99,91
II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	3.141.299.560	3.052.487.351	97,17
A Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.118.878.960	1.058.146.233	94,57
1 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	4 laporan pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	1.118.878.960	1.058.146.233	94,57
B Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.891.375.000	1.875.561.876	99,16
				100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
1 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih sebanyak 4.200 sertifikat benih	130.000.000	128.802.975	99,08
2 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (1 laporan)	125.000.000	121.033.971	96,83
3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang (125.000 batang)	1.636.375.000	1.625.724.930	99,35
C Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi	131.045.600	118.779.242	90,64

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi		Realisasi Fisik %
			3	4	
1	2	3	4	5	
1 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah pelaksanaan mutu sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme (1 laporan)	131.045.600	118.779.242	90,64	100
III Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	228.125.000	220.011.429	96,44	96,86
A Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	228.125.000	220.011.429	96,44	96,86
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	28.125.000	20.644.450	73,40	74,5
2 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (1 unit)	200.000.000	199.366.979	99,68	100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
IV Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	534.985.000	497.191.349	92,94
A Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (kegiatan)	534.985.000	497.191.349	92,94
1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang tertanggulangi (600Ha)	404.645.000	393.072.851	97,14
2 Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (250 ha)	130.340.000	104.118.498	79,88
V Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	37.900.000	36.747.350	96,96
				100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
A Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan	37.900.000	36.747.350	100
1 Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	37.900.000	36.747.350	100
VI Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	10.431.538.100	9.996.411.576	100
A Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	10.381.138.100	9.947.382.702	100
1 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (94 kelompok)	10.381.138.100	9.947.382.702	100

Uraian Program/Keg/Sub Keg.	Target	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik %
1	2	3	4	5
B Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	50.400.000	49.028.874	97,28
1 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (1 unit)	50.400.000	49.028.874	97,28
				100

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dan mampu mencapai beberapa target yang ditetapkan, bahkan melebihi beberapa indikator kinerja utama. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara perencanaan yang matang, dukungan pendanaan yang memadai, pelaksanaan teknis yang disiplin, serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, petani, dan mitra pelaksana.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pembangunan perkebunan tidak hanya didasari oleh kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan dinas-dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, namun juga dipengaruhi faktor lainnya seperti swadaya masyarakat, banyaknya investasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan baik itu perusahaan swasta maupun nasional serta stakeholder lainnya.

Terintegrasi dan terkoordinasinya masing-masing stakeholder dalam pembangunan perkebunan diharapkan mendukung pencapaian target kinerja yang lebih baik, sehingga "Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua", dapat tercapai

Beberapa langkah kedepan harus terus ditingkatkan antara lain:

1. Tetap melaksanakan pembangunan perkebunan dengan berlandaskan pada potensi wilayah (berbasis kawasan) sesuai dengan Permentan nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian.
2. Peningkatan kerjasama dengan Instansi/Dinas Teknis Kabupaten/Kota harus terus dilakukan.
3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha tani yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
4. Terus melaksanakan kebijaksanaan berupa pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, menyediakan kebun-kebun sumber benih, peningkatan daya saing produk, pemberian instensif, penciptaan iklim usaha kondusif, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM dan kelembagaan petani yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

petani perkebunan melalui berbagai upaya peningkatan produksi usaha tani secara optimal, meningkatkan penyediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan devisa ekspor dengan memperluas pasar dan upaya peningkatan mutu sesuai dengan tuntutan konsumen.

5. Meningkatkan industri hilir perkebunan untuk mengurangi disparitas harga yang diterima petani.

Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode 1 tahun. Selama periode tersebut sudah banyak kegiatan yang diselenggarakan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis seperti yang tertuang dalam penetapan kinerja di awal tahun anggaran 2025 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129
E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: <http://perkebunan.sumselprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AGUS DARWA, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2025

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. AGUS DARWA, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196508241994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatan Areal Produksi Perkebunan	- Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%) - Meningkatnya Luas Areal Perkebunan (Ha)	0.40% 2.965.000 Ha
2.	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Perkebunan	- Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn) - Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn) - Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn) - Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn) - Jumlah Benih Unggul Yang Beredar (Benih) - Persentase Peningkatan Prasarana Perkebunan (%) - Meningkatkan Pengawasan Perusahaan Perkebunan (Unit) - Persentase Petani Yang Terhubung Dalam Pengolahan Pemasaran Bersama (%) - Meningkatkan Kelompok Petani Yang Mendapatkan Penyuluhan (Kelompok) - Nilai Tukar Petani (Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat)	1.48 3.55 0.95 1.19 17.250.000 Benih 13,75% 316 Unit 24,15% 93 Kelompok 115,15 %
3.	Meningkatkan Perlindungan	Luas Areal Yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	750 Ha
4.	Dukungan Kesekretariatan Untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.917.644.882,-	APBD
2.	Penyuluhan Pertanian	Rp. 15.320.000.000,-	APBD
3.	Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 75.000.000,-	APBD
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 500.000.000,-	APBD
5.	Penyediaan dan Pengembangan	Rp. 250.000.000,-	APBD

Prasarana Pertanian

- | | | | | |
|----|--|-----|-----------------|------|
| 6. | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. | 3.525.642.461,- | APBD |
|----|--|-----|-----------------|------|

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ..!

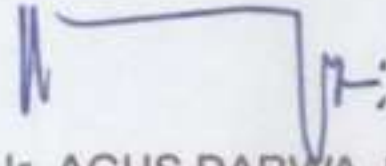


ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

Palembang,

2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. AGUS DARWA, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196508241994031002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129
E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: <http://perkebunan.sumselprov.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herdi Apriansyah, S.STP., M.M
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

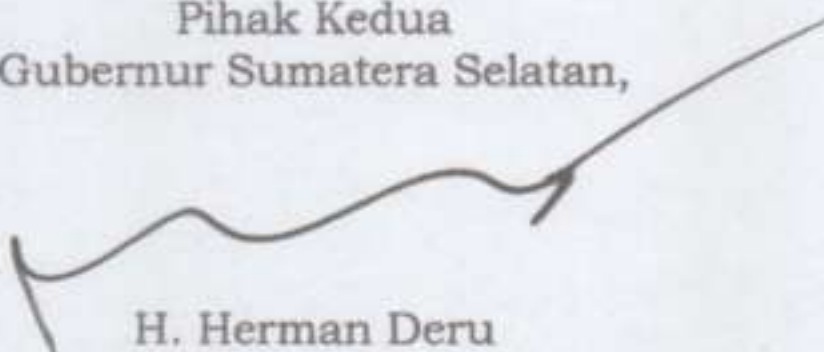
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

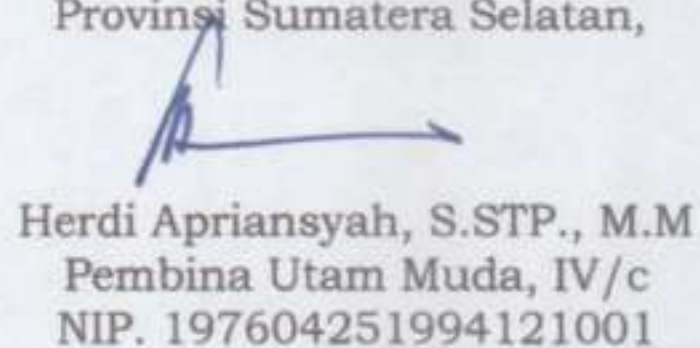
Palembang, 2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan,



Herdi Apriansyah, S.STP., M.M
Pembina Utam Muda, IV/c
NIP. 197604251994121001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Tujuan:</u> Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	%	116
2.	<u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan	5. Persentase Peningkatan Produksi Karet	%	0,109
			Ton	1.009.461,18
		6. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	%	0,445
			Ton	3.415.125,61
		7. Persentase Peningkatan Kopi	%	3,713
			Ton	226.786,63
		8. Persentase peningkatan produksi kelapa	%	1,441
			Ton	62.535,54
3.	<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	A (80,75)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 3.141.299.560,-	APBD
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 228.125.000,-	APBD
3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 534.985.000,-	APBD
4. Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.900.000,-	APBD
5. Penyuluhan Pertanian	Rp. 10.431.538.100,-	APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.563.852.324,-	APBD

Palembang,

2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Herdi Apriansyah, S.STP., M.M
Pembina Utam Muda, IV/c
NIP. 197604251994121001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129
E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: <http://disbun.sumselprov.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025 sesuai dengan pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, Maret 2026

Sekretaris Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan,
Ketua Tim



Dian Eka Putra, S.TP., M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19791111 200604 1 009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS PERKEBUNAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.SI. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001